

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank sebagai badan usaha di bidang keuangan yang memiliki berbagai jasa yang dapat digunakan oleh pengguna jasa. Bank merupakan salah satu lembaga yang beroperasi seperti perusahaan lainnya yaitu mencari keuntungan. Keberadaan bank haruslah bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh siapa saja yang menggunakan jasa bank. Bagi para pelaku usaha maupun bukan tidak terlepas dari kebutuhan mereka akan jasa bank.

Kategori bank di Indonesia terdiri dari 2 jenis bank, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembangunan Daerah bukanlah satu kategori atau jenis bank tersendiri, tetapi masuk dalam kategori Bank Umum. Disebut sebagai Bank Pembangunan Daerah karena memang Bank Pembangunan Daerah ditujukan sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi untuk turut mendukung program kerja Pemerintah Provinsi yang membutuhkan layanan jasa keuangan dan perbankan.

Bank Pembangunan Daerah adalah bank umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi di berbagai daerah. Bank Pembangunan Daerah di Indonesia berjumlah 27 bank yang tersebar pada wilayah Provinsi di pulau Sumatera sejumlah 8 bank, Kalimantan sejumlah 4 bank, Jawa sejumlah 6 bank, Sulawesi sejumlah 4 bank, dan masing masing 1 bank pada wilayah pulau Bali, Maluku, NTT, NTB dan Papua (asbanda.co.id).

BUKU bank merupakan singkatan dari Bank Umum Kegiatan Usaha. Sebagaimana yang telah diketahui bank adalah lembaga keuangan di bawah otoritas Bank Indonesia yang melakukan serangkaian kegiatan usaha yang lebih luas. Agar kegiatan usaha bank terkelola dan terarah dengan baik serta mampu menciptakan persaingan sehat, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Selanjutnya OJK mengeluarkan peraturan terkait hal tersebut yang tertuang dalam POJK No. 6/POJK.03/2-16. Peraturan Modal inti merupakan keseluruhan modal yang dimiliki bank untuk menjalankan operasional/kegiatan usahanya. BUKU bank menentukan ragam kegiatan usaha yang bisa dilakukan oleh suatu bank. Kategorisasi BUKU bank dikelompokkan menjadi 4 yaitu:

1. BUKU 1, bank dengan modal inti kurang dari Rp. 1 Triliun
2. BUKU 2, bank dengan modal inti Rp. 1 Triliun sampai dengan kurang dari Rp. 5 Triliun
3. BUKU 3, bank dengan modal inti Rp. 5 Triliun sampai dengan kurang dari Rp. 30 Triliun
4. BUKU 4, bank dengan modal inti di atas Rp. 30 Triliun.

Dari penelusuran Kontan.co.id (2020) terhadap 27 bank daerah yang beroperasi di Indonesia kini, hingga September 2019 masih ada 4 bank masih punya modal di bawah Rp 1 trilliun atau masih tergolong sebagai bank umum kegiatan usaha (BUKU) 1. Mereka adalah PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) Rp. 190 miliar, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung senilai Rp. 643 miliar, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Rp. 689 miliar, dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Rp. 814 miliar.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Program Transformasi BPD yang telah diluncurkan pada tanggal 26 Mei 2015 lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasuki 1 tahun awal implementasi. Bank Pembangunan Daerah (BPD) pun terus didorong pertumbuhannya untuk menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selaku lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, terus berupaya agar Program Transformasi BPD dapat berdampak besar bagi pembangunan ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan industri perbankan Nasional.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) perlu bertransformasi karena terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu dibenahi secara struktural yakni (ojk.go.id:2015):

1. Kontribusinya terhadap pembangunan daerah masih rendah yang tercermin dari relatif kecilnya pangsa kredit produktif yakni baru mencapai 26%.
2. Tata kelola, sumberdaya manusia, manajemen risiko dan infrastruktur yang belum memadai yang memicu peningkatan kredit bermasalah segmen produktif.
3. Daya saing BPD masih rendah karena produk dan mutu pelayanan belum memadai.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon mengatakan, Program Transformasi ini menjadi salah satu harapan untuk dapat meningkatkan kapasitas BPD dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah. "Kalau lihat potensi lingkungan terhadap perkembangan transformasi luar biasa. Salah satu fokus dari OJK yang khusus adalah program transformasi BPD ini. Bahkan untuk DPR kita belum punya program khusus untuk kita kawal," ucapnya dalam sambutan seminar *Transforming BPD's to Enhance Regional Economic Development* di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Sampai akhir Maret 2016, total aset BPD sebesar Rp. 531,30 triliun (tumbuh 6,48%), Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 432,44 triliun (tumbuh 5,27%), sedangkan penyaluran kredit sebesar Rp. 328,19 triliun (tumbuh 8,12%). Laba BPD tumbuh positif sebesar 7,91%, sedangkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencapai 20,61%. Rasio *gross* NPL per Maret 2016 relatif stabil yaitu sebesar 3,89% dari sebelumnya 3,83%. Namun demikian, kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah masih kecil tercermin dari pangsa kredit produktif yang baru sekitar 30% dari total kredit yang disalurkan.

Pertumbuhan kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) dinilai masih rendah. Kondisi ini jadi salah satu penyebab akses keuangan di daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi sangat minim. Guna mengatasi masalah tersebut, OJK kini tengah mengupayakan agar bank-bank BUMN bisa membantu dalam peningkatan kualitas SDM di bank-bank BPD. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menjalin kerja sama dengan bank-bank BUMN. Jalinan kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama strategis yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. "Kita akan dorong kerja sama BPD dengan BPD. BPD yang kuat dengan BPD yang kurang kuat atau BPD sama-sama kuat. Sehingga bentuk sinergi yang lebih besar dengan demikian kapasitas membaik. Juga BPD dengan bank-bank BUMN, karena bank BUMN ini kan *network*-nya sudah sampai juga ke daerah" jelas Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman Hadad di saat jumpa pers di Gedung OJK, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2017).

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) terus mendorong penguatan modal di bank-bank daerah. Salah satunya melalui kerja sama mitra strategis bersama bank-bank BUMN. "Kami mengharapkan adanya sinergi dengan BUMN, diharapkan akan ada upaya strategis dari pelaksanaan *transforming*, salah satunya mencari bank-bank BUMN untuk menjadi mitra strategis BPD dalam memperkuat permodalan," ujar Ketua Asbanda Kresno Sadiarsi dalam seminar *Transforming BPD's to Enhance Regional Economic Development* di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Jalinan kerja sama antara BPD dan bank lainnya diharapkan bisa meningkatkan penetrasi keuangan di daerah. Hal ini dikarenakan peran BPD di berbagai daerah sangat besar membantu masyarakat. Kerja sama antar sesama BPD, dengan bank BUMN juga meliputi peningkatan kemampuan bisnis dan layanan, penguatan ketahanan kelembagaan, hingga kontribusi pembangunan daerah. Kerja sama antara BPD dengan bank BUMN juga nantinya meliputi kerja sama pemanfaatan infrastruktur perbankan. Sehingga transaksi keuangan antar daerah bisa lebih cepat dan murah." jelas Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman Hadad di saat jumpa pers di Gedung OJK, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2017).

Deputi Pengawas Perbankan IV OJK, Teguh Supangkat menjelaskan, dalam tahap percepatan pertumbuhan ini BPD diharapkan fokus untuk meningkatkan skala kerja dan kinerja bisnisnya. Untuk kemudian, efektivitas organisasi BPD pun dapat dicapai. Program transformasi BPD sendiri sebenarnya terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama lebih diarahkan ke pembangunan fondasi bank-bank daerah,

tahapan ini berlangsung pada periode 2015-2017. Tahap kedua atau yang tengah berlangsung terkait percepatan pertumbuhan sendiri akan berlangsung sampai 2020. “Dilanjutkan pada fase III, yakni tahap pemimpin pasar diarahkan untuk memelihara dan terus meningkatkan skala dan kinerja bisnis” (asbanda.co.id:2019).

Data Statistik Perbankan Indonesia per November 2020, jumlah bank konvensional yang masuk kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) I masih ada 8 bank, BUKU II 56 bank, BUKU III sebanyak 25 bank dan BUKU IV ada 7 bank. Sementara bank umum syariah BUKU I ada 4, BUKU II sebanyak 6 bank dan BUKU III ada 4 bank. Dengan aturan OJK dimana akhir 2021 semua bank umum konvensional wajib memiliki modal inti minimum Rp. 1 triliun maka semua bank BUKU I tersebut sudah naik kelas ke BUKU 2. Sementara berdasarkan penelusuran Kontan, terdapat 27 bank umum swasta konvensional yang masih memiliki modal inti di bawah Rp. 2 triliun per September 2020. Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagian besarnya juga masih bermodal inti di bawah Rp. 2 triliun (Kontan.co.id:2021).

Bank konvensional dapat diartikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Perbedaan BPD dan bank umum konvensional adalah dari segi kepemilikan saham. Untuk perbankan konvensional mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta, pemerintah pusat, atau masyarakat sedangkan BPD mayoritas kepemilikan sahamnya adalah pemerintah daerah di propinsi yang bersangkutan. Selain kepemilikan saham ada beberapa faktor lagi yang membedakan yaitu:

1. Strategi perolehan dana pihak ketiga (DPK), dimana bank konvensional memperoleh DPK hanya dari nasabah saja sedangkan BPD dapat memperoleh DPK dari suntikan dana pemerintah daerah.
2. Pemberian bunga kredit, mayoritas bunga kredit yang diberikan oleh BPD lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional.
3. Syarat dalam pemberian kredit, dimana syarat pemberian kredit dari BPD lebih mudah dibandingkan dengan bank konvensional.

**Tabel 1.1 Perbandingan Kinerja BPD dan Bank Umum Konvensional**

Uraian	2015	2016	2017	2018 (Oktober)
Aset BPD	475.696	510.794	582.113	639.050
Aset Bank Konvensional	6.095.908	6.729.799	7.387.634	7.877.830
Pangsa aset BPD	7,8%	7,59%	7,87%	8,11%
DPK BPD	356.600	383.531	449.389	532.575
DPK Bank Konvensional	4.413.056	4.836.758	5.289.377	5.554.526
Pangsa DPK BPD	8.08%	7,92%	8,49%	9,58%
Kredit BPD	329.742	359.327	393.439	413.593
Kredit Bank Konvensional	4.092.104	4.413.414	4.781.931	5.225.199
Pangsa Kredit BPD	8.05%	8,14%	8,22%	7,91%

*Sumber: SPI OJK Oktober 2018, data yang telah diolah (2020)*

Selang tiga tahun sejak dicanangkan Transformasi BPD, BPD seluruh Indonesia terus menunjukkan pertumbuhannya. Kinerja BPD ini dilihat dari kinerja keuangan maupun operasional semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang berhasil dibukukan oleh BPD seluruh Indonesia. Dilihat dari tabel diatas, per Oktober 2018, aset BPD telah mencapai Rp. 639 triliun atau meningkat 74,3% dibandingkan Rp. 475 triliun pada tahun 2015 saat dicanangkan Transformasi BPD.

Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bakal mulai meningkatkan modal inti minimum Rp. 1 triliun tahun ini, dan secara bertahap ditingkatkan hingga Rp. 3 triliun pada 2022 bakal lebih longgar kepada bank daerah. “Rencana tersebut sangat berat bagi BUKU 1 dan BUKU 2. Seharusnya untuk rencana penambahan modal Rp. 3 triliun diberi waktu minimum 5 tahun hingga 6 tahun. Meskipun buat BPD batas akhir penambahan modal minimum Rp. 1 triliun telah disetujui paling lambat 2024,” kata Presiden Direktur PT Bank Maspion Tbk (BMAS) Herman Halim kepada Kontan.co.id, Minggu (19/1/2020).

Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengafirmasi bahwa ada kelonggaran bagi bank daerah untuk memenuhi ketentuan modal baru. “OJK berencana mengeluarkan ketentuan tentang konsolidasi perbankan antara lain dengan meningkatkan modal inti minimum Rp. 3 triliun pada 2022. Sementara untuk BPD (bank pembangunan daerah) diberikan waktu hingga 2024,” kata Juru bicara OJK Sekar Putih Djarot kepada Kontan.co.id, Senin (20/01/2020).

**Tabel 1.2 Statistik Jumlah Aset BPD BUKU 1 (Rp. Juta)**

Nama Bank	2017	2018	2019
Bank Sullteng	5.259.524	6.042.682	7.608.507
Bank Bengkulu	5,865,005	5,893,388	6,678,349
Bank Lampung	5.979.450	7.348.167	7.972.990
Bank Banten	7.658.924	9.482.130	8.097.328

*Sumber: Annual Report masing-masing bank (2019)*

Tabel 1.2 merupakan tabel statistik jumlah aset BPD BUKU 1 menggambarkan bahwa aset tahun 2019 Bank Sulteng tumbuh sebesar 25,82%, Bank Bengkulu tumbuh sebesar 13,32%, Bank Lampung tumbuh sebesar 8,50%, Bank Banten mengalami penurunan sebesar 14,60%.

Dalam menghadapi daya saing, industri perbankan mulai berlomba-lomba untuk memperbaiki diri dengan cara mencapai kinerja yang baik dan optimal, karena hal itu secara tidak langsung akan berpengaruh positif pada kepercayaan yang lebih dari masyarakat terhadap bank. Kepercayaan masyarakat terhadap industri bank akan terwujud apabila bank memiliki kinerja yang baik dan mampu meningkatkan kinerjanya secara optimal dan berkelanjutan. Untuk melakukan perbaikan kinerja dapat dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kesehatan bank, menghasilkan kualitas produk yang terbaik, kualitas layanan, serta meningkatkan efisiensi, karena bank yang sehat akan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang menyimpan dana pada bank tersebut.

Kondisi perbankan saat ini mendorong pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk melakukan penilaian atas kesehatan bank. Salah satu pihak yang perlu mengetahui kinerja dari sebuah bank adalah investor sebab semakin baik kinerja bank tersebut maka jaminan keamanan atas dana yang diinvestasikan juga semakin besar. Investor dapat mengetahui kinerja suatu bank, dengan menggunakan rasio keuangan.

Kinerja perusahaan dapat dilihat melalui berbagai macam variabel atau indikator. Variabel yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Apabila kinerja sebuah perusahaan publik meningkat, nilai keusahaannya akan semakin tinggi. Informasi posisi dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi

posisi keuangan dan kinerja di masa depan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.

Bank secara periodik wajib membuat laporan keuangan untuk dapat mengetahui tingkat keuangan yang dimiliki dan kondisi keuangan Bank tersebut. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu bentuk yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan apakah perusahaan dalam kondisi yang baik atau tidak. Untuk mengetahui kondisi tersebut dapat dilakukan berbagai analisis dan salah satunya yaitu analisis rasio. Analisis rasio keuangan membutuhkan laporan keuangan sedikitnya 2 (dua) tahun terakhir dari berjalannya perusahaan agar dapat dibandingkan. Analisis rasio keuangan akan dapat mengetahui seperti apa kondisi kinerja keuangan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan perbandingan angka-angka dalam satu laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lain. Menggunakan analisis rasio keuangan bank, peneliti dapat mengetahui kinerja keuangan bank yang juga termasuk kesehatan bank itu sendiri, bank perlu menggunakan aturan-aturan pelaksanaan secara baik dan benar. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, juga terdapat Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang di dalamnya terdapat peringkat yang digunakan untuk mencerminkan kondisi Bank secara umum.

Otoritas Jasa Keuangan, melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II nomor S-61/NB.2/2018 tanggal 13 Februari 2018, memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada perusahaan asuransi PT Asuransi Recapital karena melanggar ketentuan mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi untuk memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% dari modal minimum berbasis risiko (ojk.go.id:2018). Sebagai perusahaan jasa keuangan, bank juga memiliki kewajiban dalam memenuhi tingkat solvabilitas berdasarkan ketentuan Bank Indonesia maupun OJK.

Beberapa bank optimistis rasio profitabilitas membaik. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan indikator *return on asset* (ROA). Strategi untuk menaikkan ROA adalah menurunkan biaya dana dan meningkatkan realisasi kredit berkualitas. Untuk menjaga rasio profitabilitas bank akan meningkatkan bisnis ritel dan korporasi (Kontan.co.id:2018). Kemampuan PT Bank Mandiri Tbk untuk memupuk laba kian menguat. Hal ini terbukti dari rasio *return on asset* (ROA) perbankan yang membaik dari 2,72% per akhir 2017 menjadi 3,17% di tahun lalu (Kontan.co.id:2019). Tingkat profitabilitas mengindikasikan terjadinya efisiensi bank.

Seiring dengan terbitnya berbagai kebijakan ekonomi di tengah pandemi Corona covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus memantau kondisi likuiditas perbankan (Liputan6.com:2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan BPD memiliki daya tahan dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kinerja BPD se-Indonesia juga masih baik dengan pertumbuhan kredit 4,99 persen. Di samping itu, BPD dari segi likuiditas tidak terkendala karena merupakan pengelola keuangan daerah (Tribunnews.com:2020).

Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan dapat menunjukkan kinerja keuangan pada bank. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan karena teknik ini cepat untuk mengetahui kinerja keuangan bank. Analisis rasio keuangan yang digunakan mencakup rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan aplikasi SPSS Statistik 24 untuk mengolah data yang sudah terkumpul dan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis.

Dari hasil uraian di atas ditemukan fenonema program transformasi BPD dan ketentuan OJK terkait modal inti, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai variabel-variabel yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pada Bank Pembangunan Daerah Kategori BUKU 1 Periode 2012-2019)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Bank sebagai salah satu kegiatan usaha yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat sehingga dalam rangka menghadapi segala perubahan dan tantangan secara global untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat, bank perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar memiliki ketahanan untuk menghadapi daya saing secara sehat dan wajar.

Untuk dapat mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja suatu perusahaan/bank, dapat dilakukan melalui kegiatan analisis rasio keuangan agar dapat mengetahui seperti apa kondisi kinerja keuangan perusahaan baik atau tidak. Apabila suatu bank memiliki kinerja keuangan yang baik maka kepercayaan nasabah pada bank tersebut akan tinggi.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU 1?
2. Apakah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU 1?
3. Apakah rasio likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU 1?
4. Apakah rasio solvabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU 1?
5. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU 1?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU 1

2. Untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas secara simultan terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU 1
3. Untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU 1
4. Untuk menganalisis pengaruh rasio solvabilitas secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU 1
5. Untuk menganalisis pengaruh rasio profitabilitas secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU 1

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam aspek teoritis dan aspek praktisi. Berikut manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian:

#### **1.5.1 Aspek Teoritis**

1. Bagi para akademisi, diharapkan dapat menjadi tambahan pemikiran dan pengembangan ilmu di bidang akuntansi dan investasi.
2. Bagi para peneliti, diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.5.2 Aspek Praktis**

Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai masukan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan memberikan gambaran atas hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, serta sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dimasa yang akan datang

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat sistemakita penulisan, dimana didalam tugas akhir ini terbagi dalam 5 bab, yang terdiri dari:

#### **A. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

#### **B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka penelitian tentang teori pendukung untuk variable yang akan diteliti, bab ini juga membahas secara ringkas mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian, serta lingkup penelitian.

#### C. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang langkah sistematis yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari topik bahasan yang menjelaskan mengenai metode penelitian, parameter penelitian, rincian kerja prosedur penelitian, serta alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian.

#### D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang langkah-langkah analisis data dan hasil analisis data yang telah diperoleh menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan atas hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti.

#### E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan penelitian yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang juga disertakan saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya.